



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 87/060/TAHUN 2020

TENTANG

HASIL ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA
PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
KEPULAUAN SANGIHE

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,


Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, maka perlu menetapkan Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 4

- 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisis Jabatan; *df*

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Analisis Jabatan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan;
13. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Pegawai Negeri Sipil;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 970);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2019 Nomor 1); 

16. Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Tipe A Kabupaten Kepulauan Sangihe (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2016 Nomor 41);
17. Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tipe C Kabupaten Kepulauan Sangihe (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2016 Nomor 42);
18. Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Tipe A Kabupaten Kepulauan Sangihe (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2016 Nomor 43);
19. Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Tipe A Kabupaten Kepulauan Sangihe (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2016 Nomor 44) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Tipe A Kabupaten Kepulauan Sangihe (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2019 Nomor 9);
20. Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Tipe A Kabupaten Kepulauan Sangihe (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2016 Nomor 45);
21. Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- Tipe A Kabupaten Kepulauan Sangihe (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2016 Nomor 46);
22. Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan Tipe A Kabupaten Kepulauan Sangihe (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2016 Nomor 47);
 23. Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Tipe A Kabupaten Kepulauan Sangihe (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2016 Nomor 48);
 24. Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Tipe A Kabupaten Kepulauan Sangihe (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2016 Nomor 49);
 25. Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Tipe B Kabupaten Kepulauan Sangihe (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2016 Nomor 50);
 26. Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe A Kabupaten Kepulauan Sangihe (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2016 Nomor 51);
 27. Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pangan Tipe A Kabupaten Kepulauan Sangihe (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2016 Nomor 52); #

28. Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Tipe A Kabupaten Kepulauan Sangihe (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2016 Nomor 53);
29. Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A Kabupaten Kepulauan Sangihe (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2016 Nomor 54);
30. Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe B Kabupaten Kepulauan Sangihe (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2016 Nomor 55);
31. Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe A Kabupaten Kepulauan Sangihe (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2016 Nomor 56);
32. Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Tipe A Kabupaten Kepulauan Sangihe (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2016 Nomor 57);
33. Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe A Kabupaten Kepulauan Sangihe (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2016 Nomor 58);
34. Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 4

- Tipe C Kabupaten Kepulauan Sangihe (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2016 Nomor 59);
35. Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A Kabupaten Kepulauan Sangihe (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2016 Nomor 60);
 36. Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tipe C Kabupaten Kepulauan Sangihe (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2016 Nomor 61);
 37. Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tipe A Kabupaten Kepulauan Sangihe (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2016 Nomor 62);
 38. Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe A Kabupaten Kepulauan Sangihe (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2016 Nomor 63);
 39. Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Tipe A Kabupaten Kepulauan Sangihe (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2016 Nomor 64);
 40. Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Pertanian Tipe B Kabupaten Kepulauan Sangihe (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2016 Nomor 65); 4

41. Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tipe A Kabupaten Kepulauan Sangihe (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2016 Nomor 66);
42. Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Serta Penelitian dan Pengembangan Tipe A Kabupaten Kepulauan Sangihe (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2016 Nomor 67);
43. Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Keuangan Tipe A Kabupaten Kepulauan Sangihe (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2016 Nomor 68);
44. Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Serta Pendidikan dan Pelatihan Tipe B Kabupaten Kepulauan Sangihe (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2016 Nomor 69);
45. Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tipe A Kabupaten Kepulauan Sangihe (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2016 Nomor 70);
46. Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2016 Nomor 71);

47. Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Tipe A (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2016 Nomor 72);
48. Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 73 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Tipe B (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2016 Nomor 73);
49. Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 74 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2016 Nomor 74);
50. Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit Liung Kendage Tahuna (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2016 Nomor 75);
51. Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pembentukan 8 Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2019 Nomor 3);
52. Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan Rumah Sakit Umum Liung Paduli (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2019 Nomor 4);
53. Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2019 Nomor 24); &

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Hasil Analisis jabatan dan Analisis Beban Kerja Setiap Perangkat Daerah sebagaimana diktum KESATU dipergunakan sebagai pedoman bagi penyusunan kebijakan dibidang Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe serta sebagai pedoman pokok dalam penyusunan formasi pegawai dan syarat jabatan dalam pengangkatan dan perencanaan kebutuhan pendidikan dan pelatihan.
- KETIGA : Pedoman sebagaimana diktum KEDUA, menjadi dasar Keputusan Pengangkatan Dalam Jabatan Pelaksana dan jabatan fungsional di tiap Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan memperhatikan pangkat/golongan, pendidikan, kompetensi dan diklat teknis yang telah diikuti.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. *J*

Ditetapkan di Tahuna
pada tanggal, 18 Februari 2020

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



JABES EZAR GAGHANA

**REKAPITULASI HASIL ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PERANGKAT DAERAH
 KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE**

NO	PERANGKAT DAERAH	JUMLAH KEADAAN ASN SEKARANG (BESEETING)	JUMLAH HASIL ABK PERANGKAT DAERAH	KEKURANGAN/KELEBIHAN ABK PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
1.	SEKRETARIAT DAERAH (TERMASUK STAF AHLI) TIFE A				
1.1.	Sekretaris Daerah	1	1	-	-
1.2.	Asisten Sekretaris Daerah	3	3	-	-
1.3.	Staf Ahli Bupati	3	3	-	-
1.4.	Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah	6	12	-6	Kekurangan
1.5.	Bagian Kesejahteraan Rakyat	7	13	-6	Kekurangan
1.6.	Bagian Hukum	7	13	-6	Kekurangan
1.7.	Bagian Pengelola Perbatasan	6	13	-7	Kekurangan
1.8.	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	7	13	-6	Kekurangan
1.9.	Bagian Infrastruktur	7	13	-6	Kekurangan
1.10.	Bagian Pembangunan	8	14	-6	Kekurangan
1.11.	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	8	71	-63	Kekurangan
1.12.	Bagian Organisasi	7	16	-9	Kekurangan
1.13.	Bagian Umum	23	24	-1	Kekurangan
1.14.	Bagian Tata Usaha Pimpinan	32	44	-12	Kekurangan

NO	PERANGKAT DAERAH	JUMLAH KEADAAN ASB SEKARANG (BESEETING)	JUMLAH HASIL ASB PERANGKAT DAERAH	KEKURANGAN/KELEBIHAN ASB PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
1.15.	Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol	8	12	-4	Kekurangan
2.	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TIPE C	26	91	-65	Kekurangan
3.	INSPEKTORAT TIPE A	48	77	-29	Kekurangan
4.	DINAS PENDIDIKAN TIPE A	45	73	-28	Kekurangan
4.1.	Guru Sekolah Dasar	570	878	-308	Kekurangan
4.2.	Guru Sekolah Menengah Pertama	362	692	-330	Kekurangan
5.	DINAS KESEHATAN TIPE A	39	86	-47	Kekurangan
5.1.	UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Liung Keadage	248	263	-15	Kekurangan
5.2.	UPTD Rumah Sakit Pratama Liung Padull	36	160	-124	Kekurangan
5.3.	UPTD Puskesmas Dagho	34	54	-20	Kekurangan
5.4.	UPTD Puskesmas Enemawira	46	65	-19	Kekurangan
5.5.	UPTD Puskesmas Kabakitang	23	54	-31	Kekurangan
5.6.	UPTD Puskesmas Kalawaga	22	50	-28	Kekurangan
5.7.	UPTD Puskesmas Kendahé	23	54	-31	Kekurangan
5.8.	UPTD Puskesmas Kolneigis	32	54	-22	Kekurangan
5.9.	UPTD Puskesmas Kuma	25	59	-34	Kekurangan
5.10.	UPTD Puskesmas Lapango	26	54	-28	Kekurangan
5.11.	UPTD Puskesmas Manahu	49	61	-12	Kekurangan
5.12.	UPTD Puskesmas Manente	33	54	-21	Kekurangan
5.13.	UPTD Puskesmas Manganitu	38	59	-21	Kekurangan
5.14.	UPTD Puskesmas Marore	15	47	-32	Kekurangan
5.15.	UPTD Puskesmas Nusa Tabukan	14	49	-35	Kekurangan

NO	PERANGKAT DAERAH	JUMLAH KEADAAN ASN SEKARANG (BESEETING)	JUMLAH HASIL ABK PERANGKAT DAERAH	KEKURANGAN/KELEBIHAN ABK PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
5.16.	UPTD Paskesmas Pintarang	20	49	-28	Kekurangan
5.17.	UPTD Paskesmas Salurang	16	50	-33	Kekurangan
5.18.	UPTD Paskesmas Tamako	49	50	-30	Kekurangan
5.19.	UPTD Paskesmas Tuna	40	54	-21	Kekurangan
6.	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TIPE A	69	111	-42	Kekurangan
7.	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN TIPE A	24	39	-15	Kekurangan
8.	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN TIPE A	24	39	-15	Kekurangan
9.	DINAS SOSIAL TIPE A	21	33	-12	Kekurangan
10.	DINAS TENAGA KERJA TIPE B	19	31	-12	Kekurangan
11.	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	16	31	-15	Kekurangan
12.	DINAS PANGAN TIPE A	15	17	-2	Kekurangan
13.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP TIPE A	25	48	-23	Kekurangan
14.	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TIPE A	15	17	-2	Kekurangan
4.1	UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	19	40	-21	Kekurangan
15.	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA TIPE B	24	36	-12	Kekurangan
16.	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	25	26	-1	Kekurangan
17.	DINAS PERHUBUNGAN TIPE A	47	61	-14	Kekurangan
18.	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TIPE A	22	69	-47	Kekurangan
19.	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH TIPE C	14	24	-10	Kekurangan
20.	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TIPE A	24	25	-1	Kekurangan
21.	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA TIPE A	14	30	-16	Kekurangan

NO	PERANGKAT DAERAH	JUMLAH KEADAAN ASN SEKARANG (BESEETING)	JUMLAH HASIL ABK PERANGKAT DAERAH	KEKURANGAN/KELEBIHAN ABK PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
22.	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA TIPE A	26	49	-23	Kekurangan
23.	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN TIPE A	15	32	-17	Kekurangan
24.	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN TIPE A	25	49	-24	Kekurangan
25.	DINAS PERTANIAN TIPE B	45	93	-48	Kekurangan
26.	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN TIPE A	26	44	-18	Kekurangan
26.1	UPT Metrologi Legal Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	3	6	-3	Kekurangan
27.	BADAN PERENCANAAN SERTA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TIPE A.	29	34	-23	Kekurangan
28.	BADAN KEUANGAN TIPE A	40	54	-14	Kekurangan
29.	BADAN KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TIPE B	33	45	-12	Kekurangan
30.	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	24	36	-12	Kekurangan
31.	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	20	40	-20	Kekurangan
32.	KECAMATAN TIPE A/B				
32.1.	KECAMATAN TAHUNA TIPE A	16	31	-15	Kekurangan
32.1.1	KELURAHAN SOATALOARA I	6	15	-9	Kekurangan
32.1.2	KELURAHAN SOATALOARA II	6	15	-9	Kekurangan
32.1.3	KELURAHAN SAWANG HENDAR	5	15	-10	Kekurangan
32.1.4	KELURAHAN APENGSEMBEKA	5	15	-10	Kekurangan
32.1.5	KELURAHAN BUNGALAWANG	5	15	-10	Kekurangan
32.1.6	KELURAHAN MAHENA	8	15	-7	Kekurangan
32.1.7	KELURAHAN MANENTE	7	15	-8	Kekurangan
32.1.8	KELURAHAN SANTIAGO	7	15	-8	Kekurangan

4

NO	PERANGKAT DAERAH	JUMLAH KEADAAN ASN SEKARANG (BESEETING)	JUMLAH HASIL ABK PERANGKAT DAERAH	KEKURANGAN/KELEBIHAN ABK PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
32.2.	KECAMATAN TAHUNA TIMUR TIPE A	14	30	-16	Kekurangan
32.2.1.	KELURAHAN DUMUHUNG	7	15	-8	Kekurangan
32.2.2.	KELURAHAN TIDORE	6	15	-9	Kekurangan
32.2.3.	KELURAHAN TONA I	6	15	-9	Kekurangan
32.2.4.	KELURAHAN TONA II	6	15	-9	Kekurangan
32.2.5.	KELURAHAN TAPUANG	7	15	-8	Kekurangan
32.2.6.	KELURAHAN BATULEWEHE	6	15	-9	Kekurangan
32.2.7.	KELURAHAN ENENGAHEMBANG	5	15	-10	Kekurangan
32.2.8.	KELURAHAN LESA	5	15	-10	Kekurangan
32.3.	KECAMATAN TAHUNA BARAT TIPE A	12	30	-18	Kekurangan
32.3.1.	KELURAHAN ANGGES	2	15	-13	Kekurangan
32.3.2.	KELURAHAN PANENEKENG	7	15	-8	Kekurangan
32.3.3.	KELURAHAN BEHA	6	15	-9	Kekurangan
32.3.4.	KELURAHAN BEHA BARU	3	15	-12	Kekurangan
32.3.5.	KELURAHAN MITUNG	2	15	-13	Kekurangan
32.3.6.	KELURAHAN AKENGBAWI	4	15	-11	Kekurangan
32.4.	KECAMATAN KENDAH TIPE A	18	32	-14	Kekurangan
32.5.	KECAMATAN TABUKAN UTARA TIPE A	27	43	-15	Kekurangan
32.6.	KECAMATAN TABUKAN SELATAN TIPE A	23	37	-14	Kekurangan
32.7.	KECAMATAN TABUKAN SELATAN TENGAH TIPE A	19	35	-16	Kekurangan
32.8.	KECAMATAN TABUKAN TENGAH TIPE A	19	39	-20	Kekurangan
32.9.	KECAMATAN TABUKAN SELATAN TENGGARA TIPE A	20	36	-16	Kekurangan

NO	PERANGKAT DAERAH	JUMLAH KEADAAN ASN SEKARANG (BEKETING)	JUMLAH HASIL ABK PERANGKAT DAERAH	KEKURANGAN/KELEBIHAN ABK PERANGKAT DAERAH	HETERANGAN
32.10.	KECAMATAN MANGANITU TIPE A	23	40	-17	Kekurangan
32.11.	KECAMATAN MANGANITU SELATAN TIPE A	14	34	-21	Kekurangan
32.12.	KECAMATAN TAMAKO TIPE A	29	39	-10	Kekurangan
32.13.	KECAMATAN TATOARENG TIPE A	16	28	-12	Kekurangan
32.14.	KECAMATAN NUSA TABUKAN TIPE B	13	27	-14	Kekurangan
32.15.	KECAMATAN MARORE TIPE B	15	33	-18	Kekurangan
JUMLAH		3114	5505	-2485	

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



JABES EZAR GAGHANA